



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**RENCANA KERJA**  
**TAHUN 2021**

**Komp. Perkantoran Pemprov Kepri**  
**Gedung B2 Lt.1**  
**Pulau Dompok Tanjungpinang**



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, BAB VIII, Ketentuan Peralihan, Pasal 10 ayat (1), disebutkan bahwa *“Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan”*.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, KESBANGPOL menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan program dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan dibidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- d. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dibidang politik dalam negeri dan kewaspadaan dini;
- e. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dibidang ketahanan seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan;

- f. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dibidang ketahanan ekonomi;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam satu tahun anggaran. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Forum OPD, dan Penetapan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

### **1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Persiapan Penyusunan Renja mencakup: (1) Penyusunan rancangan keputusan kepala Perangkat Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah; (2) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; (3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan (4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

### **2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah**

Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah meliputi: (1) Perumusan Rancangan Renja Perangkat Daerah, dan (2) Penyajian Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Pengolahan data dan informasi; (b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah; (c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (d) Telaahan terhadap rancangan awal Perangkat Daerah;

(e) Perumusan tujuan dan sasaran; (f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat; (g) Perumusan kegiatan prioritas; (h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah; (i) Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah; (j) Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan (k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, dan arahan menteri terkait.

### **3. Forum Perangkat Daerah**

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota. Dalam forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibahas, sehingga diperoleh masukan perbaikan Program dan Kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

### **4. Penetapan Renja SKPD**

Penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 ini, masih perlu disesuaikan dengan Rancangan Awal RKPD, karena masih menunggu Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau tentang Penyampaian Rancangan Awal RKPD sebagai Bahan Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kesbangpol Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021;
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau;
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 494);
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 608).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau tahun **2021** sebagai berikut :

#### **1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana kerja ini adalah penjabaran tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kesbangpol kedalam rencana tahunan, guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

#### **2. Tujuan**

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kedalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program dan kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun **2021**;

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau tahun **2021** sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah tahun **2021**.
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi tentang Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- Bab V Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Renja Kesbangpol tahun **2021**.



**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2019**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kesbangpol Tahun Lalu dan Capaian Renstra 2016-2021 Kesbangpol**

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2019 (Tahun n-2) menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesbangpol berjalan dengan baik. Kesbangpol mengelola pagu anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.6.388.568.810,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.645.109.105,00 atau sebesar **88,36%**, dan realisasi fisik sebesar **90,19%**.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kesbangpol Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Tahun 2020 yang dikaitkan dengan capaian target Renstra Kesbangpol berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kesbangpol tahun-tahun sebelumnya.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu : (*Tabel 2.1*)
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut : (*Tabel 2.1*)
3. Realisasi Program/Kegiatan yang *melebihi* Target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : (*Tabel 2.1*)
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu sebagai berikut :
  - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan :
  - b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihinya target kinerja program/kegiatan:
  - c. Komitmen dan kerjasama dari pimpinan unit, pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
  - d. Dukungan Perangkat Daerah terkait dan Kesbangpol Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kesbangpol :  
Capaian renstra secara umum telah berjalan dengan baik, dengan capaian pada seluruh kegiatan telah mencapai 100%, bahkan ada diantaranya telah melebihi target kinerja maupun anggaran yang direncanakan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada penyusunan Renja tahun 2021 yaitu : perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja.

Secara rinci Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kesbangpol dan Pencapaian Renstra Kesbangpol s/d Tahun 2020 terlihat pada Tabel 2.1.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kesbangpol**

Kinerja pelayanan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 secara keseluruhan relatif baik. Hal ini terlihat dari sebanyak 6 (enam) indikator program yang ditargetkan dalam Renja tahun 2019, 6 (enam) diantaranya telah tercapai sesuai dengan target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja pada urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat tergolong sangat baik.

Secara rinci Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol

Berdasarkan Analisis gambaran pelayanan Kesbangpol, Kajian Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Kesbangpol, serta Kajian terhadap Pencapaian Kinerja Renstra Kesbangpol, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kesbangpol tersebut dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kesbangpol berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut :

1. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:
  - a. Masih rendahnya tingkat keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah baik antara RKPD dengan RPJMD, renstra dengan renja, renstra dengan RPJMD;
  - b. Belum optimalnya tingkat keselarasan antara program dan kegiatan yang disusun dengan program dan kegiatan yang diimplementasikan;
  - c. Belum optimalnya kualitas evaluasi hasil pembangunan daerah;
  - d. Tingkat kemampuan SDM belum merata dalam penyusunan perencanaan pembangunan;
  - e. Masih kurangnya fasilitasi kebijakan, penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik tingkat Provinsi dengan Kabupaten/Kota, instansi Vertikal dan Perangkat Daerah.
  - f. Masih lemahnya integrasi sistem data perencanaan dan evaluasi antara Kesbangpol Provinsi dengan Kesbangpol Kabupaten/Kota.
  - g. Belum optimalnya pelaksanaan *e-planing* untuk menyerap usulan masyarakat berdasarkan usulan renja Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota.
  - h. Belum terpenuhinya kebutuhan hasil penelitian dan pengembangan untuk menunjang kinerja pembangunan daerah.

2. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Kesbangpol adalah sebagai berikut:
  - a. Kesbangpol Provinsi memiliki tantangan untuk mendorong seluruh Kesbangpol Kabupaten/Kota dalam memecahkan isu strategis di Provinsi Kepulauan Riau, meliputi:
    - 1) Pembinaan dan Peningkatan Kesatuan Bangsa (NKRI), Wawasan Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Karakter Bangsa, dan Nilai-nilai Pancasila bagi Daerah di Wilayah Perbatasan;
    - 2) Pembinaan Daya Tangkal Masyarakat dan Pemantauan Terhadap Berkembangnya Paham Radikalisme, serta Potensi/Embrio Terorisme di Wilayah Perbatasan;
    - 3) Keterpaduan Penanganan Konflik Sosial (Pencegahan, Penghentian, Penyelesaian) Konflik Meliputi IPOLEKSOSBUDHANKAM di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
    - 4) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (TUSI) Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, yang dikenal dengan Pemerintahan Umum (PUM) dalam Mengkoordinir Instansi Vertikal di Provinsi Kepulauan Riau;
    - 5) Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan yang Tinggi, khususnya pada saat pelaksanaan hari-hari besar keagamaan.
  - b. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan transparansi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan semakin meningkat, menjadi tantangan untuk terus memperbaiki proses dan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta mendorong Pimpinan Unit dan Pelaksana Kegiatan untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan;
  - c. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-bhineka-an, NKRI, demokratisasi, revolusi karakter bangsa, dan restorasi sosial budaya serta stabilitas dalam negeri, dalam rangka memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - d. Belum tertatanya struktur politik (suprastruktur dan infrastruktur politik), pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri, dan hubungan antar lembaga negara, dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis;

- e. Optimalisasi peran partai politik dalam mendorong sistem presidensial yang lebih baik dan mendorong partisipasi perempuan dalam bidang politik (UU 2/2011);
  - f. Optimalisasi peran penyelenggara pemilu (UU 15/2011);
  - g. Menuju Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serentak (UU 42/2008);
  - h. Penguatan forum-forum bidang kesatuan bangsa dan politik yaitu PPWK, FPK, FKUB, FKDM, dan Kominda (Untuk Kab/Kota);
  - i. Pemantapan dukungan Pemerintah Daerah terhadap penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba; dan
  - j. Pelaksanaan Pendidikan Politik khususnya bagi Pemilih Pemula, Perempuan dan Kaum Marjinal.
3. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kesbangpol adalah sebagai berikut:
- a. Banyaknya dukungan dari berbagai pihak untuk menyusun dokumen perencanaan yang baik.
  - b. Tersedianya sarana sistem informasi yang berbasis elektronik dalam perencanaan.
  - c. Banyaknya bimbingan teknis dan pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur perencana.
  - d. Banyaknya lembaga penelitian atau penyedia jasa yang dapat membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara baik, sehingga dihasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan selaras dengan dokumen perencanaan di tingkat daerah maupun nasional.

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi program antara Badan Kesbangpol dengan perangkat daerah provinsi dan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan daerah.
2. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan di seluruh bidang untuk mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Kesbangpol sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kesbangpol dan RPJMD 2016-2021 Provinsi Kepulauan Riau.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 terhadap Program dan Kegiatan beserta Rencana Kebutuhan Dana dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 perlu ditinjau kembali dan diperbaiki sebelum ditetapkan RKPD Tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3. berikut:

**BAB III  
TUJUAN DAN SASARAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun **2021** berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memerhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; *ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat*; dan sosial.

Selain SPM, terdapat beberapa urusan pelayanan wajib non dasar dan pilihan serta penunjang urusan di daerah yang mendukung prioritas nasional, diantaranya adalah Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sesuai arahan Presiden, penugasannya untuk memastikan bahwa terdapat 3 (tiga) program pembangunan yang terdiri dari :

1. Seluruh Rencana Pembangunan (K/L Maupun Instansi / Lainnya) Sesuai Dengan RKP.
2. Memastikan Rencana Pembangunan Konsisten dengan Penganggarannya.
3. Mengendalikan pelaksanaan Rencana Pembangunan

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2021**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program

dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan.

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai, yaitu:

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun ke depan (*Renstra Kesbangpol 2016-2021*). Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistim pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat, dan uang yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan output. Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil, manfaat, dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan dengan tujuan

jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Penetapan 2 (dua) Sasaran Badan Kesbangpol untuk periode Renstra 2016-2021, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Adapun 2 (dua) sasaran Badan Kesbangpol sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan beserta indikator capaiannya adalah sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu sebagai berikut:

**1. Meningkatkan keamanan, ketenteraman, ketertiban, kerukunan, dan nasionalisme di masyarakat.**

Sasaran yang dituju yaitu: Terciptanya lingkungan aman, kondusif, harmonis dan cinta tanah air.

**2. Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Kepulauan Riau**

Sasaran yang dituju yaitu: Peningkatan Hak-hak Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat, dan juga Terciptanya Lembaga Demokrasi yang baik.

**Tujuan dan sasaran Kesbangpol di atas**, sebagaimana tugas dan fungsinya dalam mendukung arah kebijakan daerah (*RPJMD 2016-2021 Provinsi Kepulauan Riau*), namun belum mengacu pada Renstra K/L (*Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri*), hal ini disebabkan karena di tahun 2020 ini, merupakan tahun terakhir pelaksanaan dari Renstra 2015-2019 Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri.

Pogram prioritas nasional menjadi salah satu dasar bagi Kesbangpol untuk mereposisi Renja Kesbangpol Tahun 2021, sebagaimana Ranwal RKPd 2021 yang *telah* ditetapkan kepala daerah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau *Nomor 15 Tahun 2018* tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau *Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 494)*. (Catatan : Tabel T-C.31. dan Tabel 4.1 Renja Kesbangpol Tahun 2021).

Tabel tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kesbangpol dalam Renja Kesbangpol Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Renja**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2020 (tahun n-1)	Target Kinerja Program Tahun 2021
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan keamanan, ketenteraman, ketertiban, kerukunan, dan nasionalisme di masyarakat	Terciptanya lingkungan aman, kondusif, harmonis dan cinta tanah air	Persentase potensi konflik sosial tertangani	%	100 %	100 %
1.	Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Hak-hak Politik dan Partisipasi Politik, Serta Terciptanya Lembaga Demokrasi yang baik	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILEG, PILPRES, PILGUB, PILKADA) - PILKADA - PILEG - PILPRES	% % %	- 73,50 % 64,75 %	61,50 % - -
			Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan aturan	%	82,35 %	84,21 %

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta menghasilkan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat guna mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

Untuk mencapai hal tersebut, langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pejabat struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, agar mengawal pelaksanaan Renja Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh tanggungjawab menyelenggarakan dan melaksanakan Renja Tahun 2021 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2021 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Renja 2021 dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2021.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan program dan kegiatan Renja tahun 2021 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Badan dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Dengan disusunnya Renja Kesbangpol Tahun 2021, maka penetapan tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dapat memberikan dukungan dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 Provinsi Kepulauan Riau.

Ranwal Renja Kesbangpol Tahun 2021 ini, diharapkan juga telah sesuai dengan ketentuan prioritas pembangunan Daerah yang akan menjadi acuan penyusunan Ranwal RKPD 2021 Provinsi Kepulauan Riau, yang akan dijabarkan dalam Dokumen RKPD 2021 dapat mendukung arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD 2016-2021 Provinsi Kepulauan Riau sasaran dan prioritas dalam RKPD Tahun 2021 akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan Kesbangpol Kabupaten/Kota, perangkat daerah Provinsi/Kab/Kota dan Instansi Vertikal Terkait. Semoga dengan tersusunnya Ranwal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021, mendorong peningkatan kualitas kinerja dan perannya sebagai pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menangani urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2021 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kesbangpol 2016-2021.

Tanjungpinang,

**KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

dto

**Ir. LAMIDI, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19620626 199003 1 008

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020**  
**Provinsi Kepulauan Riau**

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2019 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>I.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>										
<b>I.I.</b>	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT</b>										
<b>1. 1. 01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Pemenuhan kebutuhan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Bulan</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>36.00</b>	<b>60.00</b>
1. 1. 01. 07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya tunjangan pejabat pengelola keuangan	Bulan	60	12	12	12	100	12	36.00	60.00
1. 1. 01. 18.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Terbayarnya Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Bulan	60	12	12	12	100	12	36.00	60.00
1. 1. 01. 36.	Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	60	12	12	12	100	12	36.00	60.00
<b>1. 1. 02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Bulan</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100.00</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>44.44</b>
1. 1. 02. 055.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana mobilitas aparatur	Bulan	48	0	12	12	100.00	12	24	50.00
1. 1. 02. 059.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	Bulan	60	12	12	12	100.00	12	36	60.00
<b>1. 1. 04.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun</b>	<b>Bulan</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100.00</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>60.00</b>
1. 1. 04. 009.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bulan	60	12	12	12	100.00	12	36	60.00
1. 1. 04. 012.	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Dokumen LAKIP yang akuntabel	Bulan	60	12	12	12	100.00	12	36	60.00
<b>1. 1. 05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi</b>	<b>Orang</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>31.82</b>
1. 1. 05. 156.	Bimtek dan Kursus Bagi Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek dan Kursus	Orang	15	0	0	0	0.00	4	4	26.67
1. 1. 05. 157.	Pelatihan Intelijen	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan Intelijen	Orang	73	0	0	0	0.00	0	0	0.00
<b>1. 1. 08.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun</b>	<b>Dokumen</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>25.00</b>
1. 1. 08. 055.	Revisi Penyusunan Renstra	Tersedianya Dokumen Revisi Renstra	Dokumen	3	0	0	0	0.00	0	0	0.00
1. 1. 08. 079.	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD)	Tersedianya Dokumen Renstra	Dokumen	1	1	0	0	0.00	0	1	100.00
1. 1. 08. 092.	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, PK dan Rencana Aksi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renja	Dokumen	4	0	0	0	0.00	1	1	25.00

<b>1. 1. 15.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>Data/informasi dan aplikasi sistem informasi terkelola</b>	<b>Bulan</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>20.00</b>
1. 1. 15. 93.	Kegiatan Survey, Verifikasi, dan Monitoring pada kegiatan Hibah OPD	Termonitornya pemberian dana hibah/sosial OPD	Bulan	12	0	12	0	0.00	0	0	0.00
1. 1. 15. 109.	Pengembangan Operasional Aplikasi Berbasis Web OPD	Tingkat Keterisian data Aplikasi Website OPD	Bulan	48	0	0	0	0.00	12	12	25.00
<b>1. 1. 37.</b>	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Persentase Konflik Sosial Tertangani</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1. 1. 37. 01.	Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Jumlah dokumen yang dihasilkan dalam Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Dokumen	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00
1. 1. 37. 02.	Aksesibilitas Rakyat dan Pengusaha Mikro terhadap Lembaga Keuangan dan Perbankan di Provinsi Kepri	Jumlah Peserta yang mengikuti Aksesibilitas Rakyat dan Pengusaha Mikro terhadap Lembaga Keuangan	Peserta	345	75	70	70	100.00	65	210	60.87
1. 1. 37. 03.	Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Terselenggaranya sosialisasi dan dialog Forum Pembauran Kebangsaan se Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00
1. 1. 37. 04.	Pengawasan Orang Asing	Laporan Data Pengawasan Orang Asing, Ormas Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Kepri	Dokumen	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00
1. 1. 37. 05.	Peningkatan Peran FKUB	Terselenggaranya sosialisasi dan dialog Forum Kerukunan Umat Beragama se Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00
1. 1. 37. 06.	Pembinaan Generasi Muda di bidang kewaspadaan dini di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah generasi muda yang mendapatkan pembinaan tentang pentingnya kewaspadaan dini	Peserta	500	0	80	80	100.00	80	160	32.00
1. 1. 37. 07.	Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi Provinsi Kepri	Tersedianya Laporan Pemantauan Program Pembangunan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	5	0	1	1	100.00	1	2	40.00
1. 1. 37. 10.	Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Bidang Kesbangpol di Prov. Kepri	Jumlah dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan Monev Program pembangunan kesbangpol di Prov. Kepri	Dokumen	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00
1. 1. 37. 11.	Outbond Pembauran Kebangsaan Bagi Pelajar/Mahasiswa di Provinsi Kep. Riau	Jumlah Peserta yang mengikuti Outbond Pembauran Kebangsaan 1 tahun	Peserta	400	100	50	50	100.00	60	210	52.50
1. 1. 37. 12.	Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah peserta yang memahami 4 Pilar Kebangsaan	Peserta	550	0	0	0	0.00	225	225	40.91
1. 1. 37. 0	Peningkatan Fungsi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kepri	Tersedianya Laporan Aktivitas Konflik Sosial yang Terjadi Provinsi Kepri	Laporan	1	1	0	0	0.00	0	1	100.00
1. 1. 37. 13.	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kepulauan Riau	Laporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi	Laporan	15	0	3	3	100.00	3	6	40.00
1. 1. 37. 18.	Pertemuan Forum Kesbangpol se Provinsi Kepulauan Riau	Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kegiatan Kesbangpol se Provinsi	%	90	0	60	60	100.00	72	132	146.67
1. 1. 37. 19.	Bulan Cinta Tanah Air (Proklamasi Kemerdekaan RI)	Meningkatnya Rasa Cinta Tanah Air dikalangan Pelajar dan Perguruan Tinggi di Provinsi Kepulauan Riau	Peserta	400	0	0	0	0.00	100	100	25.00
1. 1. 37. 20.	Fasilitasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM).	Tersedianya Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Provinsi Kepri	Dokumen	4	0	0	0	0.00	1	1	25.00
1. 1. 37. 32.	Sosialisasi Peningkatan Budaya dan Etika Politik dalam Rangka Penguatan Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan bagi Pelajar di Provinsi Kepri	Meningkatnya Budaya dan Etika Politik Pelajar di Provinsi Kepri	Peserta	500	0	0	0	0.00	300	300	60.00
1. 1. 37. 14.	Pelatihan Bela Negara bagi Pemuda/Mahasiswa	Jumlah Pemuda dan Mahasiswa yang mengikuti Pelatihan Bela Negara	Peserta	100	0	100	100	100.00	0	100	100.00
1. 1. 37. 09.	Revitalisasi nilai-nilai Pancasila di Lingkungan Perguruan Tinggi/Pelajar dan Masyarakat	Jumlah kelompok Pelajar dan Mahasiswa yang dilibatkan dalam pengrevitasian nilai-nilai Pancasila	Peserta	450	0	50	50	100.00	0	50	11.11



1. 1. 37. 16.	FORKOMPIMDA	Tuntasnya Semua Permasalahan Faktor-faktor Penghambat Pembangunan Daerah	Dokumen	3	0	0	0	0.00	1	1	33.33
1. 1. 37. 15.	Peningkatan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Terselenggaranya Forum Dialog Penguatan dan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam	Dokumen	4	0	0	0	0.00	1	1	25.00
1. 1. 37. 17.	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Dalam Negeri di Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Menggunakan Hasil Produk Dalam Negeri	Peserta	400	85	0	0	0.00	100	185	46.25
1. 1. 37.	Rapat Konsolidasi Antisipasi Munculnya Konflik Sara di Provinsi Kepri	Terciptanya konsolidasi antar tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan Pemerintah dalam mengantisipasi munculnya konflik SARA di Provinsi Kepri	Peserta	0	100	0	0	0.00	0	100	100.00
1. 1. 37. 21.	Pemetaan Wilayah Rawan Konflik SARA di Provinsi Kep. Riau.	Terselenggaranya Identifikasi Pemetaan Wilayah Potensi Konflik SARA di Provinsi Kepri	Dokumen	4	0	0	0	0.00	1	1	25.00
1. 1. 37. 22.	Pembinaan dan Pengembangan Forum Dialog Penyelesaian Konflik di Daerah	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan forum dialog dalam penyelesaian konflik di daerah	Dokumen	4	0	0	0	0.00	1	1	25.00
1. 1. 37. 23.	Pembinaan dan Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dalam rangka penguatan karakter bangsa dan wawasan kebangsaan	Peserta	300	0	0	0	0.00	0	0	0.00
1. 1. 37.	Pembinaan Kesadaran Bela Negara Bagi Pelajar/Mahasiswa	Terselenggaranya forum dialog pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan Pelajar/Mahasiswa	Peserta	250	0	0	0	0.00	0	0	0.00
1. 1. 37. 24.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Pengembangan Nilai-nilai Seni dan Budaya dalam Rangka Penguatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.	Terselenggaranya forum dialog pengembangan nilai-nilai seni dan budaya di lingkungan masyarakat Provinsi Kepri	Dokumen	4	0	0	0	0.00	1	1	25.00
1. 1. 37. 25.	Lokakarya peningkatan nilai-nilai Kebangsaan dan Patriotisme	Jumlah peserta yang mengikuti Lokakarya Peningkatan nilai-nilai kebangsaan dan patriotisme	Peserta	250	0	0	0	0.00	50	50	20.00
1. 1. 37. 26.	Harmonisasi Antar Organisasi Keagamaan di Provinsi Kepri	Jumlah Organisasi Keagamaan yg mengikuti harmonisasi	Peserta	160	0	0	0	0.00	40	40	25.00
1. 1. 37. 27.	Temu Generasi antar Umat Beragama se Provinsi Kepri.	Jumlah peserta temu generasi antar umat beragama di Prov. Kepri	Peserta	450	0	0	0	0.00	100	100	22.22
1. 1. 37. 28.	Fasilitasi Peran Pemda Dalam Penanganan Kesenjangan Perekonomian	Jumlah peserta dalam Fasilitasi Pemda dalam penanganan Kesenjangan perekonomian	Peserta	250	0	0	0	0.00	60	60	24.00
1. 1. 37. 35.	Fasilitasi dan Kerjasama Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen	Terselenggaranya Fasilitasi dan Kerjasama Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen	Peserta	200	0	0	0	0.00	50	50	25.00
1. 1. 37. 29.	Strategi dan Prilaku Perekonomian Masyarakat Guna Membangun Ketahanan Ekonomi.	Jumlah peserta yang mengikuti strategi dan prilaku perekonomian masyarakat guna membangun ketahanan ekonomi	Peserta	300	0	0	0	0.00	75	75	25.00
1. 1. 37. 30.	Forum Dialog Pencegahan dan Penanganan Konflik Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi	Terselenggaranya Forum Dialog Pencegahan dan Penanganan Konflik Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi	Peserta	300	0	0	0	0.00	75	75	25.00
1. 1. 37. 31.	Penguatan Implementasi Sumber Daya Alam Dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi	Jumlah Peserta yang mengikuti Penguatan Implementasi SDA dalam memperkuat Ketahanan Ekonomi	Peserta	300	0	0	0	0.00	75	75	25.00
1. 1. 37. 33.	Sosialisasi Bela Negara bagi Pemuda/Mahasiswa	Jumlah Pemuda dan Mahasiswa yang mengikuti Pelatihan Bela Negara	Peserta	700	0	0	0	0.00	300	300	42.86
1. 1. 37. 34.	Revolusi Mental Bagi Mahasiswa dan Pelajar Provinsi Kepulauan Riau	Sosialisasi dan Forum Diskusi Revolusi Mental	Peserta	750	#REF!	0	0	0.00	0	#REF!	#REF!
<b>1. 1. 69.</b>	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>1. Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu :</b>	<b>%</b>								
		- PILEG		<b>73.50</b>	<b>71.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71.65</b>	<b>97.48</b>
		- PILPRES		<b>64.75</b>	<b>59.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59.43</b>	<b>91.78</b>
		- PILGUB		<b>61.50</b>	<b>55.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.25</b>	<b>89.84</b>
		- PILKADA		<b>65.50</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>65.50</b>	<b>65.5</b>	<b>100.00</b>

		<b>2. Persentase Organisasi Masyarakat dan LSM yang sesuai dengan aturan</b>	<b>%</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	<b>100.00</b>	<b>16.00</b>	<b>32.00</b>	<b>32.00</b>
						<b>80.00</b>					
1. 1. 69. 0	Validasi dan Update Data Ormas/LSM di Provinsi Kepulauan Riau	Verifikasi Data Ormas/LSM Penerima bantuan keuangan dan Update Data Base Ormas/LSM	Laporan	1.00	1.00	0	0	0.00	0.00	1.00	100
1. 1. 69. 01.	Monitoring Ormas/LSM Penerima Bansos dan Update Data base Ormas/LSM	Verifikasi Data Ormas/LSM Penerima bantuan keuangan dan Update Data Base Ormas/LSM	Laporan	5.00	0.00	1	1	100	1.00	2	40
1. 1. 69. 04.	Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Bimbingan, supervisi dan evaluasi dalam pengembangan Perencanaan Pembangunan Politik di Tingkat Provinsi	%	87.00	70.26	72.00	72.84	101.17	80.00	74.37	85.48
1. 1. 69. 05.	Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah dokumen verifikasi parpol yang mendapat bantuan keuangan	Dokumen	5.00	1.00	1	1	100	1.00	3.00	60
1. 1. 69. 06.	DESK PILKADA di Provinsi Kepulauan Riau	Pemantauan Terhadap Penyelenggaraan Pemilu di Daerah, yang terdiri dari Pelaporan, Tahapan Penyelenggaraan Pilkada dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Dokumen	2.00	NA	0	0	0.00	1.00	1.00	50
1. 1. 69. 09.	Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen ORMAS	Terlaksananya pembinaan Ormas/LSM yang sesuai dengan kebijakan/regulasi yang mengatur tentang Organisasi Masyarakat	Peserta	500.00	NA	0	0	0.00	150.00	150.00	30
1. 1. 69. 10.	Dukungan Kelancaran Pileg/Pilpres/Pilgub/ Pilkada di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari dukungan kelancaran pemilu	Dokumen	4.00	0.00	0	0	0.00	1.00	1.00	25
1. 1. 69. 03.	Peningkatan kapasitas Politik kaum Perempuan di Provinsi Kepulauan Riau.	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas politik kaum perempuan di Prov. Kepri	Peserta	500.00	0.00	80	80	100	0.00	80.00	16
1. 1. 69. 07.	SOSILIASI Peraturan Penyelenggaraan Tugas-tugas Kesatuan Bangsa dan Politik	Dikatehainya Peraturan Tentang Pelaksanaan dan Pembinaan Demokrasi Politik di Prov. Kepri	Peserta	1000.00	0.00	0	0	0.00	250.00	250.00	25
1. 1. 69. 14.	Dialog Politik dan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda di Provinsi Kepulauan Riau	Terselenggaranya Dialog Politik dan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda di Provinsi Kepulauan Riau	Peserta	150.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0
1. 1. 69. 13.	Penyelenggaraan forum dialog persaudaraan masyarakat melanesia Indonesia	Terlaksananya Komunikasi dan Interaksi dengan Masyarakat Melanesia di Indonesia	Peserta	250.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0
1. 1. 69. 02.	Pembinaan Manajemen Ormas dan LSM	Terlaksananya pembinaan Ormas/LSM yang sesuai dengan kebijakan/regulasi yang mengatur	Peserta	150.00	80.00	150	150	100	0.00	230.00	153.33
1. 1. 69. 16.	Politik Cerdas dan Berintegritas bagi Generasi Muda	Terlaksananya Sosialisasi dan Forum Komunikasi Politik Cerdas dan Berintegritas Bagi Generasi Muda di Prov. Kepri	%	83.50	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0
1. 1. 69. 17.	Pemantauan Perkembangan Politik di Provinsi Kepulauan Riau	Pemantauan situasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai akibat dari aktifitas Politik di Daerah	Laporan	2.00	1.00	0	0	0.00	0.00	1.00	50
1. 1. 69. 18.	Sosialisasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Sosialisai dan Forum Komunikasi serta Dokumen Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik sesuai UU Parpol, PP, Permendagri dan Peraturan BPK RI	Dokumen	3.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0
1. 1. 69. 19.	Sistem Informasi Manajemen POLDAGRI	Sosialisai, Forum Komunikasi, Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik Dalam Negeri Yang Memuat Tentang Grafik Partai Politik, Laporan Situasi Politik dan Data KDH	Laporan	3.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Provinsi Kepulauan Riau**

Kode	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK (Output)	Target Renstra Badan Kesbangpol				Realisasi Capaian		Realisasi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>I.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>						0					
<b>I.I.</b>	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT</b>											
1. 1. 01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	Pemenuhan kebutuhan Administrasi Perkantoran	12	12	12	12	12	12	12	12	
1. 1. 02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12	12	12	12	12	12	12	12	
1. 1. 04.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bulan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	12	12	12	12	12	12	12	12	
1. 1. 05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Orang	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	0	4	24	3	0	24	0	24	Ada Usulan Pengurangan Target Renstra
1. 1. 08.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun	0	1	0	2	0	1	0	2	Ada Usulan Pengurangan Target Renstra
1. 1. 15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Bulan	Data/informasi dan aplikasi sistem informasi terkelola dengan baik	0	12	12	12	0	12	12	12	Ada Usulan Pengurangan Target Renstra
1. 1. 37.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	Persentase Konflik Sosial Tertangani	100	100	100	100	100	100	100	100	
1. 1. 69.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	%	1. Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu									
			- PILEG	0.00	0.00	73.50%	0.00%	0.00%	0.00%	73.50%	0.00%	
			- PILPRES	0.00	0.00	64.75%	0.00%	0.00%	0.00%	64.75%	0.00%	
			- PILGUB	0.00	0.00	0.00%	61.50%	0.00%	0.00%	0.00%	61.50%	
		- PILKADA	0.00	65.50%	0.00%	0.00%	0.00%	66.30%	0.00%	0.00%		
%	2. Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan aturan	80.00%	81.82%	82.35%	84.21%	80.00%	81.82%	82.35%	84.21%			

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKP Tahun 2021**  
**Provinsi Kepulauan Riau**

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Rancangan Awal RKP					Kode	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>				<b>15,525,000,000</b>	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>				<b>14,934,522,650</b>
<b>1.5</b>	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>15,525,000,000</b>	<b>1.5</b>	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>14,934,522,650</b>
<b>1.5.1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang prima</b>		<b>3,734,000,000</b>	<b>1.5.1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang prima</b>		<b>3,161,997,050</b>
1.5.1.17	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Provinsi Kepulauan Riau	Terbayarnya tunjangan pejabat pengelola keuangan	12	976,000,000						
1.5.1.18	Penyediaan jasa tenaga pendukung	Provinsi Kepulauan Riau	Terbayarnya Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL)	12	543,565,000	1.5.1.18	Penyediaan jasa tenaga pendukung	Provinsi Kepulauan Riau	Terbayarnya Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas	12	411,781,500
1.5.1.36	Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran	Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	12	2,214,435,000	1.5.1.36	Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran	Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	12	2,750,215,550
<b>1.5.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>606,000,000</b>	<b>1.5.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>874,671,600</b>
1.5.2.55	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya sarana mobilitas aparatur	12	252,000,000	1.5.2.55	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Sarana Mobilitas Aparatur	12	520,955,200
1.5.2.59	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	12	354,000,000	1.5.2.59	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai	12	353,716,400
<b>1.5.4</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>50,000,000</b>	<b>1.5.4</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>49,953,400</b>
1.5.4.9	Penyusunan laporan keuangan	Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12	25,000,000						
1.5.4.12	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Dokumen LAKIP yang akuntabel	12	25,000,000						
						1.5.4.146	Pelaksanaan SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12	49,953,400
<b>1.5.5</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Peningkatan kapasitas kompetensi dan profesionalitas pegawai</b>		<b>270,000,000</b>	<b>1.5.5</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Peningkatan kapasitas kompetensi dan profesionalitas pegawai</b>		<b>468,898,100</b>
1.5.5.156	Bimtek dan Kursus Bagi Aparatur	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek dan Kursus	4	50,000,000	1.5.5.156	Bimtek dan Kursus Bagi Aparatur	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek dan Kursus	4	100,000,000
1.5.5.157	Pelatihan Intelijen	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan Intelijen	25	220,000,000	1.5.5.157	Pelatihan Intelijen	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan Intelijen	25	219,945,100
						1.5.5.360	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kesbangpol	Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Kesbangpol	15	148,953,000
<b>1.5.7</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>		<b>Tersedianya data dan Informasi perangkat daerah</b>		<b>100,000,000</b>	<b>1.5.7</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>		<b>Tersedianya data dan Informasi perangkat daerah</b>		<b>100,003,100</b>
1.5.7.109	Pengembangan Operasional Aplikasi Berbasis Web OPD	Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya data dan Informasi perangkat daerah	12	100,000,000	1.5.7.109	Pengembangan Operasional Aplikasi Berbasis Web OPD	Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya data dan Informasi perangkat daerah	12	100,003,100
<b>1.5.8</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah</b>			<b>1.5.8</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah</b>		<b>69,304,600</b>

1.5.8.55	Revisi Penyusunan Renstra	Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Dokumen Revisi Renstra	1	-						
1.5.8.79	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD)	Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Dokumen Revisi Renstra	1	70,000,000	1.5.8.79	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD)	Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Dokumen Renstra	12	69,304,600
1.5.8.92	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, PK dan Rencana Aksi Kinerja di Lingkungan Sekretariat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Dokumen Revisi Renja	1	25,000,000						
<b>1.5.37</b>	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>		<b>Persentase potensi konflik Sosial tertangani</b>		<b>9,300,000,000</b>	<b>1.5.37</b>	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>		<b>Persentase potensi konflik Sosial tertangani</b>	<b>100%</b>	<b>7,511,296,800</b>
1.5.37.1	Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah dokumen yang dihasilkan dalam Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	1	100,000,000	1.5.37.1	Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah dokumen yang dihasilkan dalam Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	1	100,009,500
1.5.37.2	Aksesibilitas Rakyat dan Pengusaha Mikro terhadap Lembaga Keuangan dan Perbankan di Provinsi Kepri	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peserta yang mengikuti Aksesibilitas Rakyat dan Pengusaha Mikro terhadap Lembaga Keuangan dan Perbankan di Prov. Kepri	60	110,000,000	1.5.37.2	Aksesibilitas Rakyat dan Pengusaha Mikro terhadap Lembaga Keuangan dan Perbankan di Provinsi Kepri	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peserta yang mengikuti Aksesibilitas Rakyat dan Pengusaha Mikro terhadap Lembaga Keuangan dan Perbankan di Prov. Kepri	70	110,023,100
1.5.37.3	Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Provinsi Kepulauan Riau	Terselenggaranya sosialisasi dan dialog Forum Pembauran Kebangsaan se Provinsi Kepulauan Riau	1	250,000,000	1.5.37.3	Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Provinsi Kepulauan Riau	Terselenggaranya sosialisasi dan dialog Forum Pembauran Kebangsaan se Provinsi Kepulauan Riau	1	250,000,000
1.5.37.4	Pengawasan Orang Asing	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Pengawasan Orang Asing	1	200,000,000						
1.5.37.5	Peningkatan Peran FKUB	Provinsi Kepulauan Riau	Terselenggaranya sosialisasi dan dialog Forum Kerukunan Umat Beragama se Provinsi Kepulauan Riau	1	250,000,000	1.5.37.5	Peningkatan Peran FKUB	Provinsi Kepulauan Riau	Terselenggaranya sosialisasi dan dialog Forum Kerukunan Umat Beragama se Provinsi Kepulauan Riau	1	250,000,000
1.5.37.6	Pembinaan Generasi Muda di bidang kewaspadaan dini di Provinsi Kepulauan Riau	Prov. Kepri	Jumlah generasi muda yang mendapatkan pembinaan tentang pentingnya kewaspadaan dini	160	250,000,000	1.5.37.6	Pembinaan Generasi Muda di bidang kewaspadaan dini di Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah generasi muda yang mendapatkan pembinaan tentang pentingnya kewaspadaan dini	250	250,007,800
1.5.37.7	Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi Provinsi Kepri	Prov. Kepri	Terlaksananya Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi Prov. Kepri	1	120,000,000	1.5.37.7	Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi Provinsi Kepri	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi Prov. Kepri	1	120,011,500
1.5.37.9	Revitalisasi nilai-nilai Pancasila di Lingkungan Perguruan Tinggi/Pelajar dan Masyarakat	Prov. Kepri	Jumlah kelompok Pelajar dan Mahasiswa yang dilibatkan dalam pengrevitasian nilai-nilai Pancasila	160	200,000,000	1.5.37.9	Revitalisasi nilai-nilai Pancasila di Lingkungan Perguruan Tinggi/Pelajar dan Masyarakat	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah kelompok Pelajar dan Mahasiswa yang dilibatkan dalam pengrevitasian nilai-nilai Pancasila	250	200,001,000
1.5.37.10	Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Bidang Kesbangpol di Prov. Kepri	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan Monev Program pembangunan kesbangpol di Prov. Kepri	1	400,000,000	1.5.37.10	Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Bidang Kesbangpol di Prov. Kepri	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan Monev Program pembangunan kesbangpol di Prov. Kepri	1	236,902,800
1.5.37.11	Outbond Pembauran Kebangsaan Bagi Mahasiswa di Provinsi Kepri	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah laporan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial Provinsi Kepulauan Riau	120	200,000,000						
1.5.37.12	Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peserta yang memahami 4 pilar kebangsaan	125	350,000,000						
1.5.37.13	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial Provinsi Kepulauan Riau	30	1,700,000,000	1.5.37.13	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial Provinsi Kepulauan Riau	30	546,599,100
1.5.37.15	Peningkatan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Provinsi Kepulauan Riau	Terselenggaranya Forum Dialog Penguatan dan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Intelijen	1	250,000,000	1.5.37.15	Peningkatan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Provinsi Kepulauan Riau	Terselenggaranya Forum Dialog Penguatan dan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam	1	250,024,800
1.5.37.16	FORKOMPIMDA	Provinsi Kepulauan Riau	Tuntasnya Semua Permasalahan Faktor-faktor Penghambat Pembangunan Daerah	1	1,200,000,000	1.5.37.16	FORKOMPIMDA	Provinsi Kepulauan Riau	Tuntasnya Semua Permasalahan Faktor-faktor Penghambat Pembangunan Daerah	1	973,312,700
1.5.37.17	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Dalam Negeri	Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Menggunakan Hasil Produk dalam negeri	100	-						
1.5.37.18	Pertemuan Forum Kesbangpol se-Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kegiatan Kesbangpol se Provinsi Kepulauan Riau	90	950,000,000						

1.5.37.19	Bulan Cinta Tanah air (Proklamasi Kemerdekaan RI)	Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Rasa Cinta Tanah Air dikalangan Pelajar dan Perguruan Tinggi di Provinsi Kepulauan Riau	100	500,000,000						
1.5.37.20	Fasilitasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	Provinsi Kepulauan Riau	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi penanganan permasalahan aliran-aliran keagamaan di Provinsi Kepri	1	150,000,000	1.5.37.20	Fasilitasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	Provinsi Kepulauan Riau	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi penanganan permasalahan aliran-aliran keagamaan di Provinsi Kepri	1	139,626,100
1.5.37.21	Pemetaan Wilayah Rawan Konflik SARA di Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	Terselenggaranya Identifikasi Pemetaan Wilayah Potensi Konflik SARA di Provinsi Kepri	1	250,000,000	1.5.37.21	Pemetaan Wilayah Rawan Konflik SARA di Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	Terselenggaranya Identifikasi Pemetaan Wilayah Potensi Konflik SARA di Provinsi Kepri	1	250,033,400
1.5.37.22	Pembinaan dan Pengembangan Forum Dialog Penyelesaian Konflik di Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan forum dialog dalam penyelesaian konflik di daerah	1	200,000,000	1.5.37.22	Pembinaan dan Pengembangan Forum Dialog Penyelesaian Konflik di Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan forum dialog dalam penyelesaian konflik di daerah	1	199,999,700
1.5.37.23	Pembinaan dan Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan	Provinsi Kepulauan Riau	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dalam rangka penguatan	150	230,000,000						
1.5.37.24	Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengembangan Nilai-nilai Seni dan Budaya	Provinsi Kepulauan Riau	Terselenggaranya Forum Dialog Pengembangan nilai-nilai seni dan budaya di lingkungan masyarakat	1	200,000,000						
1.5.37.25	Lokakarya peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan dan Patriotisme	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah peserta yang mengikuti Lokakarya peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan dan Patriotisme	70	200,000,000						
1.5.37.26	Harmonisasi antar Organisasi Keagamaan di Provinsi Kepri	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Organisasi Keagamaan yang mengikuti Harmonisasi	40	-						
1.5.37.27	Temu Generasi antar Umat Beragama se Provinsi Kepri.	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah peserta temu generasi antar umat beragama di Prov. Kepri	150	225,000,000	1.5.37.27	Temu Generasi antar Umat Beragama se Provinsi Kepri.	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah peserta temu generasi antar umat beragama di Prov. Kepri	150	242,087,600
1.5.37.28	Fasilitasi Peran Pemda dalam penanganan Kesenjangan Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah peserta dalam Fasilitasi Peran Pemda dalam penanganan Kesenjangan Perekonomian	65	-						
1.5.37.29	Strategi dan Prilaku Perekonomian Masyarakat Guna Membangun Ketahanan Ekonomi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah peserta yang mengikuti strategi dan prilaku perekonomian masyarakat guna membangun ketahanan ekonomi	75	100,000,000						
1.5.37.30	Forum Dialog Pencegahan dan Penanganan Konflik Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi	Provinsi Kepulauan Riau	Terselenggaranya Forum Dialog Pencegahan dan Penanganan Konflik Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi	75	-						
1.5.37.31	Penguatan Implementasi Sumber Daya Alam dalam memperkuat ketahanan Ekonomi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peserta yang mengikuti Penguatan Implementasi SDA dalam memperkuat Ketahanan Ekonomi	75	-						
1.5.37.32	Sosialisasi Peningkatan Budaya dan Etika Politik dalam Rangka Penguatan Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan bagi Pelajar di Provinsi Kepri	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Budaya dan Etika Politik dalam Rangka Penguatan Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan bagi Pelajar di Provinsi Kepri	200	240,000,000	1.5.37.32	Sosialisasi Peningkatan Budaya dan Etika Politik dalam Rangka Penguatan Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan bagi Pelajar di Provinsi Kepri	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Budaya dan Etika Politik dalam Rangka Penguatan Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan bagi Pelajar di Provinsi Kepri	300	240,000,000
1.5.37.33	Sosialisasi Bela Negara bagi Pemuda/Mahasiswa	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pemuda dan Mahasiswa yang mengikuti Pelatihan Bela Negara	130	150,000,000	1.5.37.33	Sosialisasi Bela Negara bagi Pemuda/Mahasiswa	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pemuda dan Mahasiswa yang mengikuti Pelatihan Bela Negara	150	149,991,550
1.5.37.34	Revolusi Mental Bagi Mahasiswa dan Pelajar Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	Sosialisasi dan Forum Diskusi Revolusi Mental	250	-						
1.5.37.35	Fasilitasi dan Kerjasama Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen	Provinsi Kepulauan Riau	Terselenggaranya Fasilitasi dan Kerjasama Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen	50	125,000,000	1.5.37.35	Fasilitasi dan Kerjasama Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen	Provinsi Kepulauan Riau	Terselenggaranya Fasilitasi dan Kerjasama Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen	50	135,975,950
1.5.37.36	Pembinaan Kesadaran Bela Negara Bagi Pelajar/Mahasiswa	Provinsi Kepulauan Riau	Terselenggaranya forum dialog pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan Pelajar/Mahasiswa	150	200,000,000	1.5.37.36	Pembinaan Kesadaran Bela Negara Bagi Pelajar/Mahasiswa	Provinsi Kepulauan Riau	Terselenggaranya forum dialog pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan Pelajar/Mahasiswa	250	199,913,500
						1.5.37.37	Perkemahan Wawasan Kebangsaan	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Perkemahan Wawasan Kebangsaan	400	450,039,500
						1.5.37.40	Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Pengawasan Orang Asing	1	200,000,000
						1.5.37.58	Revolusi Mental Indonesia Bersatu	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Kegiatan Revolusi Mental Indonesia Bersatu	400	300,002,300

						1.5.37.59	Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gepal Narkoba (P4GN)	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gepal Narkoba (P4GN)	400	346,729,700
						1.5.37.60	Forum Kesbangpol se-Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kegiatan Kesbangpol se Provinsi Kepri dan Renja K/L	90	399,999,900
						1.5.37.61	Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	1	200,005,300
						1.5.37.62	Sosialisasi 4 Konsensus Nasional	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peserta yang memahami 4 Konsensus Nasional	400	350,000,000
						1.5.37.63	Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Desa Pesisir	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Desa Pesisir	140	120,000,000
						1.5.37.64	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Narkotika) di Kab.Natuna	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Narkotika) bagi pelajar di Provinsi	130	300,000,000
<b>1.5.69</b>	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>		<b>Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan aturan</b>		<b>1,465,000,000</b>	<b>1.5.69</b>	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>		<b>Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan aturan</b>		<b>2,767,702,600</b>
			<b>Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu (PILEG, PILPRES, PILGUB, PILKADA)</b>								
1.5.69.1	Monitoring Ormas/LSM Penerima Bansos dan Update Data base Ormas/LSM	Provinsi Kepulauan Riau	Verifikasi Data Ormas/LSM Penerima bantuan keuangan dan Update Data Base Ormas/LSM	1	200,000,000	1.5.69.1	Monitoring Ormas/LSM Penerima Bansos dan Update Data base Ormas/LSM	Provinsi Kepulauan Riau	Verifikasi Data Ormas/LSM Penerima bantuan keuangan dan Update Data Base Ormas/LSM	1	199,174,400
1.5.69.3	Peningkatan kapasitas politik kaum perempuan di Provinsi Kepri	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas politik kaum perempuan di Provinsi Kepri	150	200,000,000	1.5.69.3	Peningkatan kapasitas politik kaum perempuan di Provinsi Kepri	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas politik kaum perempuan di Provinsi Kepri	260	200,000,000
1.5.69.4	Penyusunan Indeks Demokrasi Indoensia Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Bimbingan, supervisi dan evaluasi dalam pengembangan perencanaan pembangunan Politik di Tingkat Provinsi	87	65,000,000	1.5.69.4	Penyusunan Indeks Demokrasi Indoensia Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Bimbingan, supervisi dan evaluasi dalam pengembangan perencanaan pembangunan Politik di Tingkat Provinsi	87	75,201,700
1.5.69.5	Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah dokumen Verifikasi Parpol yang mendapatkan bantuan keuangan	1	200,000,000	1.5.69.5	Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah dokumen Verifikasi Parpol yang mendapatkan bantuan keuangan	1	200,062,900
						1.5.69.6	DESK PILKADA di Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	Pemantauan Terhadap Penyelenggaraan Pemilu di Daerah, yang terdiri dari Pelaporan, Tahapan Penyelenggaraan Pilkada dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	1	1,000,193,000
1.5.69.7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pemilu	Provinsi Kepulauan Riau	Diketahuinya Peraturan Tentang Pelaksanaan dan Pembinaan Demokrasi Politik di Prov. Kepri	250	350,000,000	1.5.69.7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pemilu	Provinsi Kepulauan Riau	Diketahuinya Peraturan Tentang Pelaksanaan dan Pembinaan Demokrasi Politik di Prov. Kepri	450	350,000,000
1.5.69.9	Sosialisasi Sistim Informasi Manajemen ORMAS	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya pembinaan Ormas/LSM yang sesuai dengan kebijakan/regulasi yang mengatur tentang Organisasi Kemasyarakatan	200	250,000,000	1.5.69.9	Sosialisasi Sistim Informasi Manajemen ORMAS	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya pembinaan Ormas/LSM yang sesuai dengan kebijakan/regulasi yang mengatur tentang Organisasi Kemasyarakatan	200	246,989,900
1.5.69.13	Penyelenggaraan Forum Dialog Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Komunikasi dan Interaksi dengan Masyarakat Melanesia di Indonesia	90	200,000,000						
1.5.69.16	Politik Cerdas dan Berintegritas bagi Generasi Muda	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Sosialisasi dan Forum Komunikasi Politik Cerdas dan Berintegritas Bagi Generasi Muda di Prov. Kepri	83.50%	-						
1.5.69.18	Sosialisasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Provinsi Kepulauan Riau	Sosialisasi dan Forum Komunikasi serta Dokumen Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik sesuai UU Parpol, PP, Permendagri dan Peraturan BPK RI	1	-						
1.5.69.19	Sistem Informasi Manajemen POLDAGRI	Provinsi Kepulauan Riau	Sosialisasi Forum Komunikasi, Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik Dalam Negeri Yang Memuat Tentang Grafik Partai Politik, Laporan Situasi Politik dan Data KDH	1	-						

						1.5.69.27	Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Pemantauan Ormas/LSM di Prov.Kepri	1	496,080,700
--	--	--	--	--	--	-----------	---	-------------------------	--	---	-------------



**Tabel T-C.33.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2022**  
**Provinsi Kepulauan Riau**

**Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>				<b>15,003,827,250</b>				<b>11,489,000,000</b>
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>								
<b>1.5</b>	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>15,003,827,250</b>				<b>11,489,000,000</b>
<b>1.5.1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang prima</b>		<b>12</b>	<b>3,161,997,050</b>	<b>APBD</b>		<b>0</b>	<b>2,758,000,000</b>
1.5.1.18	Penyediaan jasa tenaga pendukung	Terbayarnya Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL)	Provinsi Kepulauan Riau	12	411,781,500	APBD		12	543,565,000
1.5.1.36	Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Provinsi Kepulauan Riau	12	2,750,215,550	APBD		12	2,214,435,000
<b>1.5.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>12</b>	<b>874,671,600</b>	<b>APBD</b>		<b>0</b>	<b>606,000,000</b>
1.5.2.55	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana Mobilitas Aparatur	Provinsi Kepulauan Riau	12	520,955,200	APBD		12	252,000,000
1.5.2.59	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai	Provinsi Kepulauan Riau	12	353,716,400	APBD		12	354,000,000
<b>1.5.4</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan</b>	<b>Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>12</b>	<b>49,953,400</b>	<b>APBD</b>		<b>0</b>	<b>-</b>
1.5.4.146	Pelaksanaan SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi Kepulauan Riau	12	49,953,400	APBD		12	-
<b>1.5.5</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Peningkatan kapasitas kompetensi dan profesionalitas pegawai</b>		<b>29</b>	<b>468,898,100</b>	<b>APBD</b>		<b>0</b>	<b>320,000,000</b>
1.5.5.156	Bimtek dan Kursus Bagi Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek dan Kursus	Provinsi Kepulauan Riau	4	100,000,000	APBD		4	100,000,000
1.5.5.157	Pelatihan Intelijen	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan Intelijen	Provinsi Kepulauan Riau	25	219,945,100	APBD		25	220,000,000
1.5.5.360	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kesbangpol	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Kesbangpol	Provinsi Kepulauan Riau	15	148,953,000	APBD		15	-

<b>1.5.7</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>Tersedianya data dan Informasi perangkat daerah</b>		<b>12</b>	<b>100,003,100</b>	<b>APBD</b>		<b>0</b>	<b>100,000,000</b>
1.5.7.109	Pengembangan Operasional Aplikasi Berbasis Web OPD	Tersedianya data dan Informasi perangkat daerah	Tanjungpinang	12	100,003,100	APBD		12	100,000,000
<b>1.5.8</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah</b>		<b>1</b>	<b>69,304,600</b>	<b>APBD</b>		<b>0</b>	<b>70,000,000</b>
1.5.8.79	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD)	Tersedianya Dokumen Renstra	Provinsi Kepulauan Riau	1	69,304,600.00	APBD		1	70,000,000.00
<b>1.5.37</b>	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Persentase potensi konflik Sosial tertangani</b>		<b>100</b>	<b>7,511,296,800</b>	<b>APBD</b>		<b>0</b>	<b>6,370,000,000</b>
1.5.37.1	Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Jumlah dokumen yang dihasilkan dalam Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Provinsi Kepulauan Riau	1	100,009,500	APBD		1	100,000,000
1.5.37.2	Aksesibilitas Rakyat dan Pengusaha Mikro terhadap Lembaga Keuangan dan Perbankan di Provinsi Kepri	Jumlah Peserta yang mengikuti Aksesibilitas Rakyat dan Pengusaha Mikro terhadap Lembaga Keuangan dan Perbankan di Prov. Kepri	Provinsi Kepulauan Riau	70	110,023,100	APBD		70	110,000,000
1.5.37.3	Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Terselenggaranya sosialisasi dan dialog Forum Pembauran Kebangsaan se Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	1	250,000,000	APBD		1	250,000,000
1.5.37.5	Peningkatan Peran FKUB	Terselenggaranya sosialisasi dan dialog Forum Kerukunan Umat Beragama se Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	1	250,000,000	APBD		1	250,000,000
1.5.37.6	Pembinaan Generasi Muda di bidang kewaspadaan dini di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah generasi muda yang mendapatkan pembinaan tentang pentingnya kewaspadaan dini	Provinsi Kepulauan Riau	250	250,007,800	APBD		250	250,000,000
1.5.37.7	Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi Provinsi Kepri	Terlaksananya Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi Prov. Kepri	Provinsi Kepulauan Riau	1	120,011,500	APBD		1	120,000,000
1.5.37.9	Revitalisasi nilai-nilai Pancasila di Lingkungan Perguruan Tinggi/Pelajar dan Masyarakat	Jumlah kelompok Pelajar dan Mahasiswa yang dilibatkan dalam pengrevitasian nilai-nilai Pancasila	Provinsi Kepulauan Riau	250	200,001,000	APBD		250	200,000,000
1.5.37.10	Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Bidang Kesbangpol di Prov. Kepri	Jumlah dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan Monev Program pembangunan kesbangpol di Prov. Kepri	Provinsi Kepulauan Riau	1	236,902,800	APBD		1	400,000,000
1.5.37.13	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	30	546,599,100	APBD		30	1,700,000,000
1.5.37.15	Peningkatan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Terselenggaranya Forum Dialog Penguatan dan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Intelijen Bagi Aparatur Daerah dan Pusat di Provinsi Kepri	Provinsi Kepulauan Riau	1	250,024,800	APBD		1	250,000,000
1.5.37.16	FORKOMPIMDA	Tuntasnya Semua Permasalahan Faktor-faktor Penghambat Pembangunan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	973,312,700	APBD		1	1,200,000,000

1.5.37.20	Fasilitasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi penanganan permasalahan aliran-aliran keagamaan di Provinsi Kepri	Provinsi Kepulauan Riau	1	139,626,100	APBD		1	150,000,000
1.5.37.21	Pemetaan Wilayah Rawan Konflik SARA di Provinsi Kepulauan Riau	Terselenggaranya Identifikasi Pemetaan Wilayah Potensi Konflik SARA di Provinsi Kepri	Provinsi Kepulauan Riau	1	250,033,400	APBD		1	250,000,000
1.5.37.22	Pembinaan dan Pengembangan Forum Dialog Penyelesaian Konflik di Daerah	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan forum dialog dalam penyelesaian konflik di daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	199,999,700	APBD		1	200,000,000
1.5.37.27	Temu Generasi antar Umat Beragama se Provinsi Kepri.	Jumlah peserta temu generasi antar umat beragama di Prov. Kepri	Provinsi Kepulauan Riau	150	242,087,600	APBD		150	225,000,000
1.5.37.32	Sosialisasi Peningkatan Budaya dan Etika Politik dalam Rangka Penguatan Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan bagi Pelajar di Provinsi Kepri	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Budaya dan Etika Politik dalam Rangka Penguatan Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan bagi Pelajar di Provinsi Kepri	Provinsi Kepulauan Riau	300	240,000,000	APBD		300	240,000,000
1.5.37.33	Sosialisasi Bela Negara bagi Pemuda/Mahasiswa	Jumlah Pemuda dan Mahasiswa yang mengikuti Pelatihan Bela Negara	Provinsi Kepulauan Riau	150	149,991,550	APBD		150	150,000,000
1.5.37.35	Fasilitasi dan Kerjasama Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen	Terselenggaranya Fasilitasi dan Kerjasama Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen	Provinsi Kepulauan Riau	50	135,975,950	APBD		50	125,000,000
1.5.37.36	Pembinaan Kesadaran Bela Negara Bagi Pelajar/Mahasiswa	Terselenggaranya forum dialog pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan Pelajar/Mahasiswa	Provinsi Kepulauan Riau	250	199,913,500	APBD		250	200,000,000
1.5.37.37	Perkemahan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Perkemahan Wawasan Kebangsaan	Provinsi Kepulauan Riau	400	450,039,500	APBD		400	-
1.5.37.40	Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing	Terlaksananya Pengawasan Orang Asing	Provinsi Kepulauan Riau	1	200,000,000	APBD		1	-
1.5.37.58	Revolusi Mental Indonesia Bersatu	Terlaksananya Kegiatan Revolusi Mental Indonesia Bersatu	Provinsi Kepulauan Riau	400	300,002,300	APBD		400	-
1.5.37.59	Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gepal Narkoba (P4GN)	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gepal Narkoba (P4GN)	Provinsi Kepulauan Riau	400	346,729,700	APBD		400	-
1.5.37.60	Forum Kesbangpol se-Provinsi	Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kegiatan Kesbangpol se Provinsi Kepri dan Renja K/L	Provinsi Kepulauan Riau	90	399,999,900	APBD		90	-
1.5.37.61	Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	200,005,300	APBD		1	-
1.5.37.62	Sosialisasi 4 Konsensus Nasional	Jumlah Peserta yang memahami 4 Konsensus Nasional	Provinsi Kepulauan Riau	400	350,000,000	APBD		400	-
1.5.37.63	Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Desa Pesisir	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Desa Pesisir	Provinsi Kepulauan Riau	140	120,000,000	APBD		140	-
1.5.37.64	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Narkotika) di Kab.Natuna	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Narkotika) bagi pelajar di Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	130	300,000,000	APBD		130	-

<b>1.5.69</b>	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang</b>		<b>21</b>	<b>2,767,702,600</b>	<b>APBD</b>		<b>0</b>	<b>1,265,000,000</b>
1.5.69.1	Monitoring Ormas/LSM Penerima Bansos dan Update Data base Ormas/LSM	Verifikasi Data Ormas/LSM Penerima bantuan keuangan dan Update Data Base Ormas/LSM	Provinsi Kepulauan Riau	1	199,174,400	APBD		1	200,000,000
1.5.69.3	Peningkatan kapasitas politik kaum perempuan di Provinsi Kepri	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas politik kaum perempuan di Provinsi Kepri	Provinsi Kepulauan Riau	260	200,000,000	APBD		1	200,000,000
1.5.69.4	Penyusunan Indeks Demokrasi Indoensia Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Bimbingan, supervisi dan evaluasi dalam pengembangan perencanaan pembangunan Politik di Tingkat Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	87	75,201,700	APBD		87	65,000,000
1.5.69.5	Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah dokumen Verifikasi Parpol yang mendapatkan bantuan keuangan	Provinsi Kepulauan Riau	1	200,062,900	APBD		1	200,000,000
1.5.69.6	DESK PILKADA di Provinsi Kepulauan Riau	Pemantauan Terhadap Penyelenggaraan Pemilu di Daerah, yang terdiri dari Pelaporan, Tahapan Penyelenggaraan Pilkada dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	1,000,193,000	APBD		1	-
1.5.69.7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pemilu	Diketuainya Peraturan Tentang Pelaksanaan dan Pembinaan Demokrasi Politik di Prov. Kepri	Provinsi Kepulauan Riau	450	350,000,000	APBD		450	350,000,000
1.5.69.9	Sosialisasi Sistim Informasi Manajemen ORMAS	Terlaksananya pembinaan Ormas/LSM yang sesuai dengan kebijakan/regulasi yang mengatur tentang Organisasi Kemasyarakatan	Provinsi Kepulauan Riau	200	246,989,900	APBD		200	250,000,000
1.5.69.27	Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Pemantauan Ormas/LSM di Prov. Kepri	Provinsi Kepulauan Riau	1	496,080,700	APBD		1	-

Jumlah Belanja Langsung 15,003,827,250  
Jumlah Belanja Tidak Langsung -  
Jumlah Pagu Belanja 15,003,827,250